GUNUNGKIDUL-KULONPROGO



Kuota Transmigrasi 2 KK, Pendaftar Sudah 9 KK

PENGASIH (KR) - Animo warga Kabupaten Kulonprogo untuk menjadi transmigran cukup besar. Menyusul jumlah pendaftar untuk transmigrasi ke Sijunjung Sumatera Barat sudah 9 Kepala Keluarga (KK), melebihi kuota yang ada yakni 2 KK.

"Tahun lalu, Kulonprogo mengirimkan dua KK untuk transmigrasi dengan tujuan Sulawesi Selatan. Dan tahun 2024 ini, juga mendapatkan kuota sebanyak 2 KK, dengan lokasi tujuan transmigrasi ke Sijunjung Sumatera Barat," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kulonprogo Bambang Sutrisno SSos MSi, Kamis (27/6).

Bambang menuturkan, bahwa kuota transmigrasi semakin menurun dari masa ke masa. Saat pandemi Covid 19 pengiriman transmigran terhenti. Pasca Covid 19, dibuka lagi, tapi kuota sangat minim. Tentu saja jauh berbeda dibanding sekitar 10 tahun lalu yang kuotanya untuk Kulonprogo bisa mencapai 50 KK.



Bambang Sutrisno

"Sebenarnya animo untuk bertransmigrasi masih lumayan. Hanya saja kuotanya sangat terbatas," ucap-

Terkait kuota tersebut, sudah diumumkan dan dibuka pendaftaran seleksi peserta calon transmigran ke Sijunjung Sumatera Barat. Sudah ada 9 KK yang mendaftar. Karena peminat jauh lebih banyak di atas kuota yang ada, maka akan dilakukan seleksi, meliputi kemampuan dan komitmennya untuk memastikan kesiapan mampu bertahan hidup dan berkembang di lokasi transmi-

"Pendaftar yang lolos se-

Perkuat Implementasi Pancasila

leksi akan diberikan pembinaan dan pelatihan. Keberangkatan masih cukup lama yakni di akhir tahun antara November - Desember 2024. Di Sijunjung, para transmigran akan bekerja di sektor pertanian, menggarap lahan pertanian maupun perkebunan. Pertanian ada jagung, sedangkan perkebunan itu seperti sawit, karet, dan kakao," kata Bambang yang pernah menjabat Staf Ahli Bupati ini.

Syarat mengikuti transmigrasi yaitu usia maksimal 50 tahun, dan harus sudah berkeluarga. Kemudian dari sisi perekonomian tidak mampu tapi mau untuk maju, karena program pemindahan penduduk untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan.

Bambang menambahkan, untuk peserta yang tidak lolos seleksi, tidak serta merta mengisi untuk kuota transmigrasi tahun berikutnya. Sebab harus disesuaikan antara kemampuan dan potensi wilayah yang menjadi tujuan transmiDIDUGA TAK BERIZIN

Pemkab Tutup Usaha Pertambangan Galian C

WONOSARI (KR) - Dinas Lingkungan Hidul (DLH) Gunungkidul bersama tim terpadu pengawasan pertambangan Pemda DIY akhirnya menghentikan sementara aktivitas pertambangan Golongan C diduga ilegal dan mendapat protes warga sekitar (KR-Selasa 18 Juni 2024).

Terdapat empat lokasi penambangan galian yang ditutup yakni di Kalurahan Serut, Gedangsari dan di Kalurahan Tancep, Kapanewon Ngawen. Kepala DLH Gunungkidul, Antonius Hary Sukmono mengatakan bahwa penghentian aktivitas tersebut tidak sekedar karena protes warga tetapi terkait dengan kepemilikan dokumen perizinan tidak lengkap.

"Karena dokumen perizinan dan persyaratan tidak lengkap maka aktifitas penambangan dihentikan," katanya.

Tidak hanya sekadar

masalah izin semata, tetapi ada beberapa persyarata yang hingga kini tidak terpenuhi diantaranya juga menyangkut soal analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam pengelolaan tambang mestinya harus diperhatikan. Menyangkut masalah tambang, dalam hal ini soal perizinan pihaknya tidak mengizinkan dan dalam hal ini pemkab hanya diberitahu dan melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan terdapat empat lokasi yang ditutup aktivitasnya. Penutupan itu



Salah satu usaha penambangan di wilayah utara Gunungkidul diduga tak berizin.

dilakukan karena pihak pengelola belum melengkapi perizinan. Karena belum dilengkapi segala persyaratannya maka menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Dari DPUP-ESDM DIY juga telah mengirim surat ke perusahaan tambang itu.

Dalam surat bernomor 500.10.2.3/20 tertanggal 7 Juni 2024, perusahaan diminta menghentikan kegiatan sebelum kelengkapan izin dipenuhi," ujarnya.

Terpisah Bupati Gunungkidul, H Sunaryanta mengatakan telah mendengar penambangan yang terjadi di Kapanewon Ngawen. Dia memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sama sekali tidak memberikan izin.

(Bmp)

USUNG ENDAH SUBEKTI - PDI PERJUANGAN

Jajaki Koalisi dengan Sejumlah Parpol

Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul mengakui sekarang pihaknya terus melakukan penjajakan dengan banyak partai politik, seperti dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat dan Partai NasDem untuk bersama mengusung Endah Subekti Kuntariningsih SE sebagai bakal calon bupati (Bacabup). Koalasi antara partai politik sampai sekarang masih cair, sehingga belum ada yang sudah pasti. Koalisi Partai Nasdem, Partai Gerindra dan PKS juga belum kokoh. Artinya, PDI Perjuangan bisa saja began-

WONOSARI (KR) - Se- dengan dengan Partai kretaris Dewan Pimpinan Nasdem dan yang lain. "Sementara PKB juga sudah menyodorkan nama Joko Purwanto sebagai bakal calon wakil bupati (bacawabup)," kata Sekretaris DPC Perjuangan Kabupaten Gunungkidul Warta SIP, Kamis (27/6).

Belum adanya kepastian koalisi sekarang ini masih membuka kemungkinan munculnya pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Sebagaimana pernah diberitakan banyak media, PDIP pernah ada pertemuan dengan DPD PAN Gunungkidul, sehingga memunculkan kemungkinan pasangan Endah Subekti Kutariningsih- Mahmud Ardi Widanto



Endah Subekti Kuntariningsih SE

(Ardi). Setelah itu muncul pertemuan antara H Sunarvanta dengan DPD PAN yang memunculkan wacana pasangan Sunaryanta-Ardi, walaupun sebelumnya sudah ada informasi pasangan Sunaryanta - Arif

Darmawan (Arda). Sementara koalisi partai NasDem Partai Gerindra, PKS sudah pernah mengumumkan pasangan Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd-Sumanto SE, tetapi sampai sekarang belum jelas perkembangannya. Sekretaris DPD Partai NasDem DIY Suharno SE dan Ketua DPC Partai Gerindra Gunungkidul Purwanto ST yang dihubungi lewat WA beberapa kali belum menyampaikan penjelasan. Bahkan ada juga wacana pasangan Sutrina Wibawa- Endah Subekti.

"Kita tunggu saja dalam satu atau dua minggu yang akan datang," tambah Sekretaris DPC PDI Perjuangan Gunungkidul Warta SIP.

Sosialisasi BPIP di Ponpes Darul Quran.

WONOSARI (KR) - Guna memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila di masyarakat, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia mengadakan sosialisasi bertema "Implementasi Pancasila dalam Masyarakat Pesantren". Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren (PP)

Darul Quran Wal Irsyad II,

Siraman, Wonosari, Kamis (27/6).. "Sumur Pancasila akan dibangun di Desa Kepek, Wonosari, yang bertujuan untuk memperbaiki akses air bersih. Sumur Pancasila ini akan pertama kali dimanfaatkan oleh Rumah Sakit NU," kata Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Prof Dr Agus Moh Najib.

Acara dihadiri Bupati

Gunungkidul H Sunaryanta, Pimpinan Ponpes Daqul Quran KH Ahmad Kharis Masduqi, Tokoh Nahdlatul Ulama, ratusan santri dan undangan. Bupati Gunungkidul Sunaryanta, dalam sambutannya menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Meskipun masyarakat mungkin sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, istilah dan doktrin Pancasila harus tetap disosialisasikan agar tidak tergerus oleh ideologi lain" ujarnya,

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Prof Drs KH Yudian Wahyudi PhD menekankan bahwa keislaman di Indonesia tidak lengkap tanpa Pancasila.

DLH dan Dispar Kirab Piala Adipura

WATES (KR) - Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Dunia, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kulonprogo menggelar kirab Piala Adipura, penyerahan bantuan alat pengelolaan sampah dan bibit pohon. Titik start kirab halaman Kantor DLH dan berakhir di halaman Pemkab Kulonprogo, Selasa (25/6).

Penghargaan Adipura merupakan instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih, teduh dan berkelanjutan.

Kepala DLH setempat Ir Gusdi Hartono MT mengatakan, hari lingkungan hidup dunia, secara global adalah fokus pada restorasi



Gusdi Hartono (kiri) menyerahkan Piala Adipura

pada Pj Bupati setempat, Srie Nurkyatsiwi.

lahan, menghentikan penggurunan dan meningkatkan ketahanan pangan terhadap kekeringan.

Dengan slogan our land, our future Hari Lingkungan Hidup secara Nasional mengusung tema 'Penyelesaian Krisis Iklim Dengan Inovasi dan Prinsip Keadilan'.

Gusdi berharap hari lingkungan hidup ini dapat kembali mengingatkan terhadap pentingnya menjaga

lingkungan demi kehidupan yang akan terus berlang-

"Trofi Adipura yang diberikan ke Kulonprogo selama 30 tahun terakhir belum pernah mendapatkan, sekarang dapat tentu kita syukuri. Mudah-mudahan dengan dukungan dari semua stakeholder dan masyarakat khususnya di Kota Wates, kita mampu mempertahankan trofi Adipura ini," harap Gusdi. (Rul)

WATES (KR) - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo meluncurkan Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) Binangun. Inovasi tersebut sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap resiko kekerasan terhadap perem-

Program tersebut dibuat atas landasan data-data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulonprogo dengan harapan dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

puan dan anak.

Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo Srie Nurkyatsiwi mengapresiasi inovasi baru berupaya layanan yang dikembangkan Dinsos P3A. Pihaknya berharap hal itu hanya menjadi awal dari sebuah program tapi dapat



TINGKATKAN PENGAWASAN KEKERASAN

Pj Bupati Kulonprogo, Srie Nurkyatsiwi meluncurkan 'Program Puspaga dan LPLPP Binangun di joglo rumdin bupati setempat.

menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Masih ada beberapa permasalahan di Kulonprogo seperti *bullying* terhadap anak, pernikahan dini, perceraian, KDRT dan kerentanan terhadap sosial lainnya. Puspaga hadir tentu untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut," tegas Pj Bupati Kulonprogo Srie Nurkyatsiwi saat

launching Program Puspaga dan LPLPP Binangun di Joglo Rumah Dinas Bupati setempat, Utara Alun-alun Wates, Kamis (27/6).

"Dengan puspaga kita bisa meminimalisir bahkan menghilangkan permasalahan tersebut, sehingga Kulonprogo benar-benar menjadi kawasan yang masyarakatnya menjadi keluarga sejahtera aman dan tidak ada lagi hal-hal

yang tidak kita harapkan,"

tegas Siwi. Dijelaskan, Puspaga tidak bisa jalan sendiri dan butuh komitmen semua pihak untuk mendukung hal tersebu. "Layanan di Puspaga bisa menyesuaikan permasalahan di lapangan seperti memperhatikan jarak tempuh, usia, pendidikan yang membutuhkan penyesuaian layanan nantinya bisa dilakukan inovasi seperti jemput bola atau bersinergi dengan panewu, lurah dan kader," ujarnya.

Siwi mengajak semua pihak mulai dari Gugus Tugas KLA, FPKK, lembaga masyarakat, dunia usaha, forum anak, Satgas PPA dan unit terdekat masyarakat yaitu keluarga turut berpartisipasi dalam mendukung pencegahan terjadinya kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram.

(Rul)